Implementasi Pelatihan Kewirausahan Bagi Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik

Yunita Eka Rizki Lestari

S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya e-mail: yunitaerlestari@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si

S1 Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya

e-mail: prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Menurunnya jumlah induk usaha sarung alat tenun bukan mesin di Desa Semampir menjadi permasalahan umum bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik. Hal tersebut yang menjadikan jumlah UMKM Kabupaten Gresik menurun. Untuk mengatasi masalah tersebut Pemerintah Kabupaten Gresik menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 530/379/HK/437.12/2017 tentang Penyelenggaran apelatihan Kewirausahaan. Pelatihan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pelatihan kewirausahaan pada Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin di Desa Semampir Kecmatan Cerme Kabupaten Gresik, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Staff Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, Pemerintahan Desa Semampir dan Pemilik Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, pengolahan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dalam penelitian ini dianalisis menggunakan teori Van Meter dan Van Horn yang memiliki enam variabel yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, hubungan antar organisasi, dispisi, dan kondisi sosial, politik dan ekonomi. Pada standar dan sasaran program, pelaksana tidak memiliki standar secara jelas yang tertulis sehingga pelaksanaan belum maksimal. Sumber daya, penyelenggara pelatihan kewirausahaan mengalami kendala dalam sumberdaya finansial. Karakteristik agen pelaksana, kurang tegasnya para implementor dalam penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan. Hubungan antar organisasi, komunikasi terjalin baik antar pelaksana sehingga menghasilkan koordinasi yang baik pula. Disposisi, respon implementor sangan mendukung dengan adanya kegiatan tersebut. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, Kondisi sosial ekonomi yang kurang merespon adanya kegiatan dan mereka cenderung mengharapkan bantuan modal dari pemerintah. Rendahnya respon masyarakat terhadap usaha sarung alat tenun bukan mesin sehingga usaha yang berbasis swadaya ini terancam kolaps. Saran yang diberikan adalah Perlu diadakannya pelatihan dan penjelasan ulang mengenai akses permodalan, karena yang dibutuhkan para pemilik usaha yaitu bantuan modal. Pada sumberdaya anggaran masih mengalami keterbatasan, karena salah satu hambatan yaitu terletak pada saat selesai pelatihan tidak adanya tindak lanjut.

Kata Kunci: Implementasi, Kewirausahaan, Sarung ATBM

Abstrack

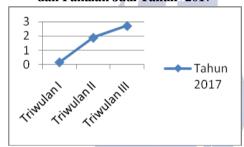
Decrease in the number of aircraft carrier looms Holster attempt not machines in the village of Semampir became general issue for the Department of Co-operatives micro-business industry and trade Gresik Regency. The thing that makes a number of small medium enterprises Gresik declined. To resolve the issue the Government of Gresik Regency publishes Regulations Regent Number 530/379/HK/437.12/2017 of the 56th apelatihan entrepreneurship. This training aims to describe how the implementation of entrepreneurial training in the Holster Attempt Looms not machines in the village of Semampir Cerme Kecmatan Gresik Regency. This type of research is descriptive qualitative approach using. The subject in this study was the Staff Service Cooperatives micro enterprises of industry and trade, Government of Gresik Regency Semampir Village business owners and Sarong Looms not machines. Data collection techniques in the form of observation, interview and documentation. The data analysis techniques in the form of data collection, data processing, data reduction and withdrawal of the conclusion. The results in this study were analyzed using the theory of Van Meter and Van Horn who has six variables are: standard and targeted policies, resources, implementing agent characteristics, relationships between organizations, dispisi, and social conditions, political and economy. On standards and implementing programs, target has no standard clearly written so that implementation has not been fullest. Resources, entrepreneurial training providers undergo financial resource constraint in. The characteristics of the implementing agents, less strictly speaking the implementor in organizing entrepreneurial training. The relationships between the Organization, the communication either between implementing interwoven to produce a good coordination. Disposition, the response by the presence of sangan implementor support such activities. The condition of social, economic, political and Social Conditions, economic activity and the presence of a responding less they tend to expect help in capital from the Government. The low response of the community towards efforts Holster looms instead of machine-based self-help efforts so that this threatened to *collapse*. The advice given is necessary holding of trainings and re-explanation on access to capital, because the required business owners, namely capital assistance. On the resource budget still have limitations, because one of the barriers that is located at the time of completion of training lack of follow-up.

Keywords: Implementation, Entrepreneurship, Sarong ATBM

PENDAHULUAN

Wirausaha diyakini sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi, serta juga dianggap sebagai inovator dalam pengembangan ekonomi. Tingginya persentase jumlah wirausaha disuatu negara maka perekonomian negara tersebut akan tumbuh dengan baik, (Casson 2006:299). Pada kenyataannya UMKM memiliki peranan yang penting bagi negara yaitu penyerapan tenaga kerja dan penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB).

Grafik 1.1 Laju Pertumbuhan PDB Usaha Tekstil dan Pakaian Jadi Tahun 2017



Sumber: BPS Nasional 2017

Dilihat dari grafik diatas bahwa laju pertumbuhan PDB usaha tekstil dan pakaian jadi di tahun 2017 mengalami peningkatan. Perkembangan usaha tekstil juga terlihat pesat dari tahun ke tahun. Hal yang menjadi unik yaitu ketika di era modern seperti saat ini masih menggunakan alat tradisional. Keunikan tersebut terdapat pada proses pembuatan sarung di Kabupaten Gresik. Usaha tekstil yang menghasilkan sarung di Kabupaten Gresik ini dinamai dengan sarung alat tenun bukan mesin karena prosesnya masih menggunakan alat tradisional.

Sarung alat tenun bukan mesin merupakan produk khas Gresik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dibuktikan pada Kementerian Perindustrian menerbitkan surat penetapan Kompetansi Inti Industri Daerah (KIID) No. 95 tahun 2015 bahwa Gresik sebagai sentra sarung tenun ATBM. Di Jawa timur hanya ada 5 daerah yang mendapatkan KIID, tentu dengan sentra produk yang berbeda. Selain itu, Kabupaten Gresik disebut sebagai kota santri dikarenakan di Kabupaten Gresik terdapat banyaknya jumlah pondok pesantren dan terdapat dua makam wali.

Usaha sarung alat tenun bukan mesin bukan satusatunya usaha yang ada di Kabupaten Gresik, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Gresik mengupayakan dalam hal meningkatkan dan mepertahankan UKM. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik untuk meningkatkan UKM yang ada di Kabupaten Gresik yaitu salah satunya dengan mengeluarkan beberapa kebijakan yang terkait dengan UKM. Salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan UKM tersebut dapat dilakukan dengan adanya Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM yang termuat dalam Peraturan Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Nomor 201 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik 2017.

Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 2017 ini memuat beberapa program. Salah satu program dalam upaya meningkatkan UKM Kabupaten Gresik yaitu Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM dengan tujuan untuk mewujudkan koperasi dan UMKM yang berkualitas, produktif, mandiri dan berdaya saing dalam rangka meningkatkan perekonomian kota yang kokoh, maju dan berkeadilan. Program tersebut memiliki beberapa kegiatan dalam pencapaian tujuannya.

Menurut Bapak Suyono selaku Kepala Bagian Humas Pemerintah Kabupaten Gresik terdapat lima kecamatan produsen sarung di Kabupaten Gresik, yaitu Kecamatan pada Gresik, Kecamatan Kebomas. Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, dan Kecamatan Duduksampeyan. Pada kenyataannya hingga saat ini produsen sarung yang masih ada yaitu di Desa Semampir Kecamatan Cerme. Sayangnya, program penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM hanya difokuskan pada empat kecamatan saja yaitu Kecamatan Cerme, Kecamatan Benjeng, Kecamatan Duduksampean, dan Kecamatan Balongpanggang. Hal tersebut dikarenakan program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM difokuskan untuk daerah yang memiliki usaha besar di Kabupaten Gresik.

Sarung alat tenun bukan mesin dahulu menjadi primadona sebagai mata pencaharian masyarakat Kecamatan Cerme. Hampir disetiap desa memiliki usaha sarung mulai dari usaha induk sarung alat tenun bukan mesin dan pekerja buruh sarung yang menjadi juragan dengan cara mengambil benang dari usaha induk dan kemudian dipekerjakan dirumah dengan beberapa pegawai kemudian hasil tenunan disetorkan kepada usaha induk lagi. Tidak hanya berhenti disitu, usaha sarung alat tenun bukan mesin ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat desa sekitar yang tidak memiliki usaha induk. Banyaknya tenaga kerja mulai dari golongan umum belum produktif sampai lanjut usia yang bekerja didalam usaha sarung alat tenun bukan mesin tersebut. Usaha sarung alat tenun bukan mesin yang saat ini masih ada yaitu berada di Kecamatan Cerme.

Keadaan induk usaha sarung alat tenun bukan mesin yang kian semakin menurun disebabkan oleh beberapa faktor yaitu diantaranya: banyaknya kawasan industri di Kabupaten Gresik yang menyebabkan banyak orang untuk memilih menjadi buruh kasaran, pangsa pasar yang kurang menjanjikan, serta masalah internal seperti sistem manajemen yang buruk oleh pemilik usaha dan kurangnya modal. Seiring berjalannya waktu usaha sarung alat tenun bukan mesin memiliki jumlah pekerja yang sedikit. Kini jumlah pekerja yang tersisa terus mengalami penurunan setiap tahunnya, penurunan pekerja itu terjadi pada pekerja yang berada di induk usaha bahkan pada pekerja yang mengambil pekerjaannya untuk dikerjakan dirumah.

Hingga saat ini usaha sarung alat tenun bukan mesin di Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik telah menerima beberapa rangkaian kegiatan yang Dinas Koperasi diberikan oleh Usaha Perindustrian dan Perdagangan untuk mengembangkan induk usaha sarung alat tenun bukan mesin di Desa Semampir. Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik memuat sembilan kegiatan. Sembilan kegiatan tersebut tidak semua diperuntukkan usaha sarung alat tenun bukan mesin. Terdapat tujuh dari sembilan kegiatan yang diperuntukkan usaha sarung alat tenun bukan mesin yang dua diantaranya dilaksanakan di Desa Semampir. Dua kegiatan tersebut meliputi kegiatan pelatihan kewirausahaan dan pelatihan peningkatan kemampuan manajemen.

Diantara pelatihan peningkatan kemampuan manajemen dan pelatihan kewirausahaan, empat kali diadakannya kegiatan kegiatan pelatihan kewirausahaan dan dua kali merupakan pelatihan manajemen. Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini dilakukan di Desa Semampir yang diperuntukkan bagi pemilik usaha sarung alat tenun bukan mesin. Pelatihan ini dilakukan empat kali dalam satu bulan dengan sistem bergiliran ke empat kecamatan yang memiliki usaha besar yaitu dengan mendatangi desa-desa tertentu. Setiap desa yang mendapatkan fasilitas pelatihan kewirausahaan

mendapatkan rangkaian kegiatan selama tiga hari berturut-turut. Pada praktiknya, kegiatan pelatihan kewirausahaan yang telah diberikan tersebut masih ada kendala yang dihadapi oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dikarenakan masyarakat masih kurang faham. Kurangnya pemahaman dari para pemilik usaha dikarenakan kurangnya antusias. Jika peserta pelatihan kurang faham mengenai tujuan kegiatan, maka hal tersebut akan menjadi kendala bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan.

Tidak adanya pemantauan kepada masyarakat dan para UKM binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik juga menjadi kendala, sehingga para pelaku UKM tidak begitu kreatif, inovatif, dan berkembang. Adanya pemantauan lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui hasil dari kegiatan yang telah dilakukan secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pelatihan kewirausahaan pada Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin di Desa Semampir Kecmatan Cerme Kabupaten Gresik?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi pelatihan kewirausahaan pada Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin di Desa Semampir Kecmatan Cerme Kabupaten Gresik.

Manfaat Penelitia

1. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya kajian administrasi, terutama mengenai kajian implementasi kebijakan publik .

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan wawasan tambahan dan pengetahuan tentang implementasi sebuah kebijakan dan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan bagi penulisdalam aplikasi dan teori sebuah kebijakan sehingga dijadikan bekal kelak saat terjun ke dunia kerja.

 Bagi Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan

Hasil ini diharapkan agar dijadikan bahan pertimbangan bagi instansi. Sehingga temuan yang mungkin ditemukan sedikit banyak dapat memberikan manfaat khususnya dalam pelaksanaan program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM.

 Bagi Kelompok Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin Desa Semampir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemilik usaha sarung alat tenun bukan mesin tentang Implementasi Pelatihan Kewirausahaan yang telah dibuat oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik agar mereka lebih mengetahui tujuan dari penyelenggaraan pelatihan.

METODE

Penelitian menggunakan Metode deskriptif ini (descriptive research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu mendiskripsikan implementasi Kewirausahaan bagi Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin di Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik. Mengacu pada pendapat Cholid Narbuko dan Abu Achmadi (2008: 44), menyatakan bahwa penelitian deskriptif vaitu penelitian vang berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan pada data-data, menyajikan data, dan menginterpretasi. Sumber menganalisis data penelitian ini diperoleh dari sumber data sebagai berikut data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan staff Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian Perdagangan Kabupaten Gresik, Pemerintahan Desa Semampir, dan pemilik usaha sarung ATBM. Data sekunder diperoleh melalui beberapa kajian kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini, laporan-laporan atau dokumen-dokumen, arsip-arsip yang dimiliki desa, laporan historis, dan struktur organisasi serta foto-foto dokumentasi penelitian. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk analisis data peneliti menggunakan teori teknik analisis menurut Van Meter dan Van Horn (dalam sugiyono, 2010:247) yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi, hubungan pelaksana, kondisi sosial ekonomi dan politik, dan disposisi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berdasarkan pada Keputusan Bupati Gresik Nomor: 530/379/HK/437.12/2017 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan dan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik Tahun 2017. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Carl Van Horn dimana dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut:

1. Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor mendasar dalam suatu implementasi. Didalamnya berisi tentang sesuatu yang hendak dicapai dalam kebijakan tersebut. Secara umum standar dari program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif ini sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2017 yaitu meliputi sembilan kegiatan. Akan tetapi standar pelaksanaan tidak tertulis secara jelas dan pasti. Selain itu, sasaran kebijakan ini yaitu diperuntukkan para usaha binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik.

Berdasarkan pernyataan dan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa proses implementasi pelatihan kewirausahaan yang dilakukan di Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik terkait variabel standar, tujuan dan sasaran kebijakan pelaksana sudah memahaminya, namun kendala muncul pada pelaksana yang tidak memiliki standar secara tertulis sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Hal ini yang menjadikan pelatihan terlaksana akan tetapi tidak tercapai tujuan secara maksimal.

2. Sumber Daya

Untuk sumber daya terbagi menjadi tiga, yaitu: sumber daya manusia, sumber daya finansial, dan sumber daya waktu. pelaksanaan pelatihan kewirausahaan harus memiliki sumberdaya yang berkompeten. Sumberdaya ideal yang harus sesuai dengan bidangnya. Bukan hanya itu saja, banyaknya aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan akan mempengaruhi terwujudnya tujuan yang hendak dicapai. Aktor yang terlibat dalam pelatihan kewirausahaan merupakan Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah desa, dan narasumber terkait materi. Pelatihan yang dilakukan empat kali dalam satu bulan ini dan dilakukan pada empat kecamatan pada desa yang memiliki usaha selama tiga hari berturut-turut ini dilakukan secara rutin oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berlanjut hingga saat ini.

Untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan tentu tidak hanya mengutamakan sumber daya manusia, akan tetapi sumber daya finansial dan sumber daya waktu juga harus diperhitungkan. Karena apabila sumber daya manusia yang berkompeten telah tersedia sedangkan kucuran dana melalui anggaran tidak tersedia maka menjadi persoalan yang pelik dalam merealisasikan apa yang hendak dicapai dalam tujuannya.

Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan ini dilakukan dengan penuh tanggung jawab, komitmen, serta keikhlasan yang tumbuh dari jiwa pelaksana. Sebab tidak adanya insentif dalam bentuk apapun dalam melaksanakan pelatihan ini. Pelaksana melakukan

tugasnya penuh tanggungjawab agar dapat menjadikan para wirausaha lebih baik dan lebih mandiri. Berdasarkan pernyataan dari Ibu Ismiyati menyatakan bahwa penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan ini mendapatkan dana sebesar Rp. 200.000.000,-. Hal ini juga dikuatkan dari Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik tahun 2017 bahwasannya dana yang dikeluarkan untuk pelatihan kewirausahaan sebesar Rp.200.000.000,-. Dana tersebut menurut Ibu Ismiyati belum mengcover kebutuhan pelatihan kewirausahaan, karena dana tersebut menurutnya masih kurang untuk pendampingan.

Keberhasilan penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan tidak hanya memperhatikan sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial saja. Melainkan sumberdaya waktu juga diperhatikan. Karena apabila sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial berjalan dengan baik akan tetapi terbentur dengan waktu yang ketat, maka juga menjadi penghambat dalam pelaksanaan.

3. Hubungan Antar Organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan. Semakin baik koordinasi komunikasi antar pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi, maka asumsi akan terjadinya kesalahan akan kecil. Komunikasi juga digunakan dalam penyampaian informasi kepada sasaran agar tujuan tercapai.

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Desa Semampir bagi pemilik usaha sarung alat tenun bukan mesin tentunya telah terdapat koordinasi antara level terendah sampai level tertinggi. Jadi dalam penyampaian informasi dibutuhkan koordinasi antar aktor yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan.

4. Karakteristik Agen Pelaksana

Implementasi kegiatan pelatihan kewirausahaan. Karakteristik agen pelaksana disini mencakup organisasi formal dan organisasi informal. Kinerja suatu implementasi kegaitan pelatihan kewirausahaan akan banyak dipengaruhi ciri-ciri yang sama dan cocok dengan para implementor.

Berdasarkan hasil observasi dilapangan, dapat dilihat bahwa setiap agen pelaksana telah terjalin koordinasi yang baik. Mereka saling mendukung dengan adanya pelatihan kewirausahaan. Pihak-pihak yang terkait menjalankan tugas dan perannya tanpa mengenal waktu serta memiliki tanggung jawab penuh terhadap tugas mereka.

Berbeda dengan tanggapan masyarakat penerima pelatihan kewirausahaan yang menganggap bahwa pelaksanaan program kurang tegas dalam menyikapi masyarakat sehingga masyarakat yang sudah menerima rangkaian kegiatan belum menerapkannya.

5. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik

Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di Desa Semampir masih mengalami berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Sampai saat ini tujuan dari pelatihan kewirausahaan masih belum tercapai karena mengalami berbagai kendala khususnya pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Rendahnya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan menyulitkan pelaksana untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa faktor sosial ekonomi yang ada pada Desa Semampir sangat berpengaruh. Pada dasarnya pemerintah menginginkan usaha tradisional dan para pengusaha sarung menggunakan sistem swadaya, akan tetapi pada kenyataannya para masyarakat Desa Semampir lebih memilih untuk menjadi buruh pabrik. Sehingga kurangnya inovatif pada produk sarung alat tenun bukan mesin Desa Semampir. Bukan hanya itu saja, para pengusaha sarung memiliki banyak harapan mengenai bantuan modal. Jika dilihat dari jumlah pegawai dan besarnya usaha yang mereka miliki, mereka masih tergolong usaha besar dan rata-rata masih memiliki lahan persawahan sebagai mata pencaharian sampingan. Jadi jika faktor ekonomi, tidak menjadi masalah.

6. Disposisi

Pelaksanaan pelatihan kewirausahaan perlu adanya respon yang positif serta adanya pemahaman dari implementor terhadap program tersebut. Hal ini dikarenakan respond an pemahaman para implementor akan mempengaruhi pelaksanaan dari program itu sendiri. jika implementor kurang respond an tanggap terhadap pelaksanaan program tentunya tujuan program tidak akan berhasil.

Adanya pelatihan kewirausahaan di Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik benar-benar sangat membantu masyarakat dalam mengembangkan UKM. Baik pelaksana dari Kabupaten maupun dari pemerintah desasama sekali tidak keberatan dalam menjalankan pelatihan kewirausahaan, justru mereka mendukung dengan adanya pelatihan ini, karena kegiatan dapat membantu masyarakat. Kegiatan diselenggarakan guna untuk memiliki jiwa kreatifitas wirausaha, mencari peluang usaha dan kemitraan usaha, serta dapat mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah. Penyelenggara kegiatan kewirausahaan ini sangat antusias mulai dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan hingga pemerintah desa dalam menyukseskan kegiatan ini.

Mengenai insentif, didalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di Desa Semampir tidak ada insentif tersendiri. Baik pelaksana Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan maupun pemerintah desa tidak pernah mendapat insentif dalam bentuk apapun. Para pelaksana pelatihan kewirausahaan menjalankan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab, komitmen, dan keikhlasan dari jiwa.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Pelatihan Kewirausahaan bagi Usaha Sarung Alat Tenun Bukan Mesin Desa Semampir Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik dapat ditarik kesimpulan bahwa berkaitan dengan variabel yang pertama yaitu standar dan sasaran program, pelaksana tidak memiliki standar secara jelas yang tertulis sehingga pelaksanaan belum maksimal. Pada variabel kedua yaitu sumberdaya, sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan di Desa Semampir sudah memadahi. Kendala bukan terletak pada sumberdaya manusia, akan tetapi muncul pada sumberdaya finansial. Kendala sumber daya finansial yaitu terletak pada kurangnya dana yang diberikan pemerintah dalam kegiatan pelatihan kewirausahaan hingga menyebabkan tidakadanya pendampingan. Variabel ketiga yaitu hubungan antar organisasi, yaitu komunikasi yang dilakukan antar pelaksana. Komunikasi yang terjalin antar pelaksana sangat baik sehingga menghasilkan koordinasi yang baik pula. Variabel keempat vaitu karakteristik agen pelaksana, dalam variabel ini terdapat kendala yaitu kurang tegasnya implementor. Hal tersebut yang akan memicu rendahnya partisipasi masyarakat mencapai keberhasilan kegiatan.

Variabel kelima yaitu kondisi ekonomi sosial politik, dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan di Desa Semampir mengalami kendala dalam kondisi sosial ekonomi masyarakat. Kondisi sosial ekonomi yang kurang merespon adanya kegiatan dan mereka cenderung bantuan modal dari pemerintah. mengharapkan Rendahnya respon masyarakat terhadap usaha sarung alat tenun bukan mesin sehingga usaha yang berbasis swadaya ini terancam kolaps. Pada dasarnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik telah menyediakan fasilitas dan materi mengenai kemitraan dan permodalan, akan tetapi nampaknya masyarakat kurang mengetahui informasi tersebut sehingga kurangnya antusias masyarakat. Variabel yang terahir yaitu disposisi, dalam variabel ini terlihat bahwa respon implementor sangat mendukung adanya kegiatan pelatihan kewirausahaan. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan dalam mewujudkan keberhasilan pelatihan kewirausahaan.

Saran

Guna mengembangkan kreatifitas wirausaha, mencari peluang usaha dan kemitraan usaha, konsep kewirausahaan dan pengendalian, penyusunan business plan dan marketing serta kiat pengembangan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah kedepannya, yang perlu diperhatikan sebagai bahan masukan adalah:

- Perlu diadakannya pelatihan dan penjelasan ulang mengenai akses permodalan, karena yang dibutuhkan para pemilik usaha yaitu bantuan modal. selain itu juga pemerintah memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh pemilik usaha seperti pembuangan limbah air hasil olahan sarung, sehingga masyarakat lainnya tidak lagi merasa resah dengan adanya industri sarung disekitar pemukiman warga.
- 2. Pada sumberdaya anggaran masih mengalami keterbatasan, karena salah satu hambatan yaitu terletak pada saat selesai pelatihan tidak adanya tindak lanjut. Hal tersebut dikarenakan kurangnya anggaran, dan seharusnya ditambahkan lagi anggaran dalam pelaksanaan pelatihan kewairausahaan agar dapat mencukupi kebutuhan dan tercapainya tujuan.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyadari bahwa selama masa penyusunan skripsi penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, nasihat, doa dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- Para Dosen Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara FISH Unesa.
- 2. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing.
- 3. Tjitjik Rahaju, S.Sos., M.Si selaku dosen penguji.
- 4. Badrudin Kurniawan, S.Ap., M.Ap., MA selaku dosen penguji.
- 5. Para narasumber yang membantu memberikan data serta informasi sehingga dapat terselesaikannya proposal skripsi ini.
- 6. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (*Edisi Revisi*). Cetakan keenam. Bandung: Alfabeta

Akdon dan Riduwan. 2007. *Rumus dan Data dalam Analisis Statistika*. Bandung: Alfabeta.

Anomsari, Arianti. (2013) Peningkatan Pemberdayaan Strategi Untuk Koperasi dan Usaha Kecil

- Menengan Melalui Program Pengembangan dan Pelatihan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Jawa Tengah. Journal Ekonomi. Vol.3, No.1
- Casson M, Yeung B, Basu A, Wadeson N. 2006. The Oxford Handbook of Entrepreneurship. New York: Oxford University Press Inc.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2008. Analisis Kebijakan Publik. ModulPendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Jakarta
- Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan 2017
 - Sugiyono, 2010. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods). Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif.*Bandung: CV. ALFABETA
- Supriatna, Tjahya. 2000. *Strategi Pembangunan dan Kemiskinan*. Jakarta: PT. Asdi Mahasatya
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- Wardhani, Fatmawati Trikusuma. (2015). *Tinjauan Kerajinan Tenun Ikat di UD. Al-Arif Desa Wedani Gresik*. Jurnal Pendidikan Seni Rupa. Vol.3, No.2
- Wibawa, Samudra dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Wicaksono, Anton Priyono. (2014). "Strategi Dinas Koperasi dan UMKM dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Kerajinan Marmer dan Onix di Kecamatan Besole Kabupaten Tulungagung)". Surabaya: Unesa Press
- Widodo, Joko. 20013. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Banyumedia Publishing

Universitas Negeri Surabaya